

INTISARI

Menurut data BPS tahun 2019, angka kemiskinan DIY lebih tinggi dari kemiskinan nasional. Selain itu tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi DIY pada tahun 2019 merupakan yang tertinggi secara nasional. Pembangunan ekonomi inklusif di DIY belum terjadi sepenuhnya. Pemerintah daerah berupaya mengurangi ketimpangan dan kemiskinan, melalui berbagai program dan kegiatan, sebagai manifestasi dari peran pemerintah yang dikaitkan dengan kebijakan fiskal, yaitu belanja pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap inklusivitas pembangunan ekonomi, sebagai identifikasi hasil kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan pengelolaan keuangan yang baik. Variabel inklusivitas pembangunan ekonomi dalam penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dikembangkan oleh Bappenas. Variabel belanja pemerintah menggunakan persentase realisasi pengeluaran belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta perumahan dan fasilitas umum. Data yang digunakan berupa data panel dengan rentang waktu 2011- 2020 dan *cross-section* sebanyak 5 wilayah kabupaten/kota di DIY. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan, serta perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI.

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif, belanja pemerintah, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi ekonomi, fungsi perumahan dan fasilitas umum, inklusivitas pembangunan.

ABSTRACT

According to the data of Statistics Indonesia (BPS) in 2019, DIY's poverty rate was higher than the national poverty rate. In addition, the level of income inequality in DIY Province in 2019 was the highest nationally. The inclusive economic development in DIY has yet to take place fully. The local government seeks to reduce inequality and poverty through various programs and activities to manifest the role of government associated with fiscal policy, namely government expenditure. This study aims to determine the effect of government expenditure on the inclusiveness of economic development to identify the results of government performance in improving the community's welfare through implementing good financial management. This study used the Inclusive Economic Development Index (IEDI) developed by the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia (Bappenas) as the variable of inclusivity of economic development. The government expenditure variable uses the percentage of the realization of government expenditure for the function of education, health, economy, as well as housing and public facilities. The data used is panel data with a period of 2011-2020 and a cross-section of 5 districts/cities in DIY. The method of analysis used in this research is panel data regression analysis. The results prove that the government expenditure variables for the function of education, health, as well as housing and public facilities have a positive and significant effect on IEDI.

Keywords: *Inclusive Economic Development Index, government expenditure, education function, health function, economic function, housing and public facilities function, development inclusiveness.*